

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran masing-masing variabel penelitian, diantaranya:
 - a. Kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Nilai rata-rata yang di peroleh adalah 20% dan berada pada kriteria kurang.
 - b. Kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Nilai rata-ratanya adalah 30% dan memiliki pola hubungan konsultatif (rendah).
 - c. Kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Nilai rata-rata yang di peroleh adalah 19% dan berada pada kriteria efektif.
 - d. Tingkat alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali pada tahun anggaran 2014-2018 mengalami fluktuasi. Nilai rata-rata alokasi belanja modal yang di peroleh adalah 19%. Besaran ini masih berada di bawah capaian alokasi belanja modal tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan pemerintah Negara Indonesia.
2. Kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
3. Kinerja keuangan melalui rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

4. Kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
5. Status wilayah administratif memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
6. Status wilayah administratif tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.
7. Status wilayah administratif tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan melalui rasio efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali tahun anggaran 2014-2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah tingkat kota se-Jawa dan Bali, diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangannya agar perolehan rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas daerah mengalami kenaikan dan mencapai kategori yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan PAD seperti mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi. Walaupun proporsi PAD yang diperoleh kota sudah lebih besar dari kabupaten, pemerintah kota tetap perlu meningkatkan perolehan PAD untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
2. Bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten se-Jawa dan Bali, diharapkan dapat lebih menggali potensi sumber daya daerahnya sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan penerimaan PAD dan dapat menyusul ketertinggalan dari daerah tingkat kota. Cara yang dapat di tempuh antara lain seperti mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi untuk kemudian dialokasikan pada belanja modal. Sehingga daerah dapat meningkatkan pembangunan dan menarik minat investor untuk dapat

menanamkan modalnya pada daerah dan dapat menimbulkan potensi penerimaan baru. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan tercapainya suatu daerah yang mandiri sesuai cita-cita otonomi.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian lanjutan terkait faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal seperti perencanaan belanja pemerintah daerah, luas wilayah dan pembentuk karakteristik pendapatan daerah. Adapun penggunaan kinerja keuangan dapat menggunakan indikator lain seperti ketergantungan daerah, efisiensi PAD, keserasian, *DSCR*, *growth* dan aktivitas dengan objek yang lebih luas. Untuk penggunaan status wilayah administratif sebagai variabel moderator pun belum banyak dilakukan, sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.